



**LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZET LIBING
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 685275

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 556.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 266.000.000
2. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 413.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2400 AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L 4X2 A/T Tahun 2019, LAINNYA Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.014.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.014.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : VEROLIENE ETLISYE FOENAY
- Jabatan** : SEKRETARIS
- NHK** : 489989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	56.400.000
1. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , LAINNYA Rp. 56.400.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOBIL, SUZUKI S-CROSS Tahun 2017, LAINNYA Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	548.378.971
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	560.874.116
F. HARTA LAINNYA	Rp.	9.329.000
Sub Total	Rp.	1.322.482.087
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.322.482.087

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MARCELINA KOPONG**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **900143**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 240.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T (SOUL GT) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 12.900.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 36.923.124****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 1.189.823.124****III. HUTANG** **Rp. 347.369.076****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 842.454.048**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERLYN SILVY MANAFE**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **800218**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 339.100.097**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 1475 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 188.800.000
3. Tanah Seluas 795 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.300.097

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 115.000.001**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp. 1
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SE 88 /SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 70.000.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 27.876.320**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 551.976.418**

III. HUTANG **Rp. 196.623.085**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

355.353.333

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GABRIEL PAKAENONI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 652453

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	231.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 56.500.000		
2. Tanah Seluas 5470 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1419 m2/282 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	111.500.000
1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.025.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	419.229.963
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	784.254.963
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	784.254.963

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 April 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMINGOS DE CARVALHO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 933804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	260.050.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	260.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.